

Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Desa Wadas Dalam Perspektif Islam

Tria Widyantari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail : triawidy26@gmail.com

Abstract: Communication between the government and the public should run in accordance with the prevailing administration in a country. Communication that is built requires synergy between the communicator and the communicant in order to avoid conflict. This study aims to reaffirm good communication between the government and society in an Islamic perspective. This study uses a qualitative method by means of literature study. Data collection techniques through documentation and observation studies. Data processing uses domain analysis to find the final conclusion. The conclusion of this study is that the communication between the government and the Wadas village community goes well which will end both with the pros and cons of government policies. Communication between the government and the community must be in accordance with the guidelines of the Qur'an, namely "Qaulan Sadida" including the correct quote, so as to bring out the welfare and benefit of the ummah.

Keywords: Communication Relations ;Government; Islam

Abstrak: Komunikasi pemerintah dan masyarakat selayaknya berjalan sesuai dengan administratif yang berlaku di suatu negara. Komunikasi yang dibangun membutuhkan sinergisitas antara komunikator dan komunikan agar menghindari konflik. Penelitian ini bertujuan mengukuhkan kembali komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan observasi. Pengolahan data menggunakan analisis domain untuk menemukan kesimpulan akhir. Kesimpulan penelitian ini adalah komunikasi pemerintah dan masyarakat desa Wadas berjalan dengan baik yang berakhir dengan pro maupun kontra akan kebijakan pemerintah. Komunikasi pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan pedoman Al-Qur'an yaitu "Qaulan Sadida" berarti perkataan yang benar, sehingga memunculkan kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.

Kata kunci: Hubungan Komunikasi, Pemerintah, Islam.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan interaksi antara komunikator dan komunikan yang mengandung pesan dan adanya timbal balik (*feedback*). Komunikasi juga membutuhkan pemahaman antara komunikator dan komunikan agar sesuai dengan fungsinya. Brent D. Ruben memberikan definisi mengenai komunikasi manusia yang lebih komprehensif sebagai berikut: "*komunikasi adalah proses sebagaimana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat. mengirim dan menggunakan informasi sebagai koordinasi lingkungan dan orang lain*". (Muhammad, 2015)

Komunikasi juga dibutuhkan bagi pemerintah dan masyarakat agar terlaksananya hubungan administratif yang baik. Sehingga terhindar dari konflik yang menimbulkan suasana tidak kondusif. Pemerintah adalah jabatan politik dan administrasi yang berfungsi sebagai kepala eksekutif yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, kewenangan pemerintah adalah agar

pembangunan terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan program pembangunan, sehingga pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD, itulah sebabnya dibutuhkan komunikasi yang baik dan benar (Qaulan Sadida dan Qaulan Karima).

Pemerintah harus mampu mengantisipasi agar tidak terjadi konflik seperti konflik agraria dan konflik lainnya. Pemerintah pun ikut andil dalam konflik agraria penambangan batu andesit yakni pemerintah seperti Presiden, Gubernur, Komnas HAM, Menko Polhukam, DPR, dan Polisi. Namun yang lebih intens melakukan komunikasi adalah Gubernur Jawa Tengah karena bertanggung jawab langsung atas konflik yang ada pada provinsi Jawa Tengah khususnya Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kemudian sampai saat ini komunikasi Gubernur Jawa Tengah (H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP) terhadap masyarakat masih berjalan dengan baik karena ingin keadaan di Desa Wadas tetap kondusif.

Namun realitasnya masih ada masyarakat yang belum mau menerima proyek tambang bendungan Bener dengan berbagai alasan seperti ganti rugi yang tidak layak, dan sudah nyaman mencari nafkah di lokasi tersebut. Sehingga pemerintah mencoba mengatasi masalah yang terjadi di Desa Wadas dengan mendengar keluh-kesah baik dari masyarakat yang pro maupun kontra terhadap proyek Bendungan Bener tersebut.

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 63 :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.”

Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati mereka, dan akan dibalas oleh Allah atas perbuatan mereka. Karena tidak ada yang satu pun yang tersembunyi dari-Nya. Allah memerintahkan untuk memberi nasihat tentang perkara yang terjadi dengan kata-kata yang membekas pada jiwa mereka. (Katsir, 2001) Sesuai dengan ayat di atas, pemerintah provinsi intens melakukan komunikasi dengan masyarakat di Desa Wadas agar mereka tidak merasa dirugikan. Pemerintah provinsi memfasilitasi kesehatan masyarakat dan jaringan internet yang sebelumnya sempat terputus, inilah bentuk perhatian pemerintah provinsi supaya masyarakat desa Wadas tetap sehat dan mudah untuk berkomunikasi melalui (luring) luar jaringan kepada masyarakat luar desa Wadas. Komunikasi dan perhatian yang diberikan pemerintah provinsi ini sesuai dengan tafsir surat An-Nisa' : 63 yaitu perkataan yang berbekas pada jiwa mereka dan juga sesuai dengan perilaku pemerintah menurut ajaran islam yaitu jujur (*siddiq*), bertanggung jawab (*amanah*), kemampuan berkomunikasi (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*).

Sejak tahun 2019 hingga saat ini terjadi konflik di desa Wadas, penyebabnya adalah karena adanya proyek tambang andesit yang menargetkan 15,53 juta meter kubik untuk pembangunan bendungan Bener. Pemerintah memutuskan mengambil batu andesit dari Desa Wadas, rencananya tambang quarry (tambang terbuka) akan dikeruk tanpa sisa yang berjalan selama 30 bulan.

Sejatinya komunikasi haruslah menjadi jembatan antara pihak satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat menghindari segala bentuk *misscommunication* yang dapat berujung pada konflik diantara dua belah pihak tersebut. Penelitian ini mencoba menggali bagaimana hubungan

komunikasi pemerintah dan komunikasi masyarakat di desa Wadas sesuai dengan perspektif Islam.

Sesuai dengan judul yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Informasi Organisasi (*Organizational Information Theory*), pandangan dari teori ini yaitu anggota kelompok maupun anggota organisasi harus memiliki sikap aktif dan pasif yang berimbang. Dalam teori ini, ada beberapa area menarik yang membantu pembaca untuk memahaminya. Contohnya dalam membuat keputusan, pengaruh sosial dalam suatu peraturan di perusahaan, dan kepuasan karyawan (West & H. Turner, 2013). Penelitian ini bertujuan mengukuhkan kembali komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan observasi.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan observasi terkait dengan konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pengolahan data menggunakan analisis domain yang dapat membantu memperoleh gambaran umum tentang data tersebut sesuai dengan cakupan penelitian (Wiratna Sujarweni, 2014). Penyajian data melalui kategorisasi sesuai permasalahan sehingga menemukan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Desa Wadas

Komunikasi pemerintah merupakan komunikasi antar manusia dalam konteks organisasi, sehingga komunikasi pemerintahan juga termasuk dalam komunikasi organisasi. Dengan adanya komunikasi pemerintah memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi atau gagasan dan sikap dari pemerintah sebagai komunikator (pemberi informasi) dengan masyarakat sebagai komunikan (penerima informasi), yaitu pemerintah sebagai komunikator untuk internal organisasi dan pengusaha, masyarakat dan organisasi pemerintah untuk eksternal organisasi dan sebaliknya (Silalahi, 2004)

Pemerintah Pusat era Presiden Jokowi Widodo melakukan pembangunan multinasional berupa Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi di beberapa daerah Indonesia, yang tertuang dalam proyek Strategis Nasional dibawah naungan kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Bendungan Bener yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo adalah salah satunya. Bendungan ini direncanakan dapat menampung volume air dengan kapasitas sebanyak 100.94 M^2 ditaksir dapat mengairi lahan seluas 15069 Hektare, yang mampu mengurangi debit air penyebab banjir sebanyak $210 \text{ M}^2/\text{detik}$, dapat menampung air baku sebesar $1,60 \text{ M}^2/\text{detik}$, dan memiliki daya listrik sebesar 6,00 Megawatt (KPPIP, 2016). Pemerintah sebagai komunikator (pemberi informasi) hal ini sesuai dengan SK Gubernur No. 590/14/2018 yang menetapkan Desa wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sebagai lokasi pembebasan lahan untuk dijadikan lokasi pengambilan bahan material yakni batuan andesit untuk tujuan pembangunan bendungan Bener (Absori et al., 2022). Setelah adanya ketetapan SK Gubernur, masyarakat tidak langsung menerima karena beberapa alasan yaitu dikhawatirkan akan merusak 28 sumber mata air di desa Wadas, hal itu juga akan merusak lahan pertanian dan warga Wadas akan kehilangan mata pencaharian. Dikhawatirkan proyek

tambang tersebut akan membuat desa Wadas semakin rawan longsor. Sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) tahun 2011-2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya desa Wadas Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang rawan longsor (Kompas, 2022).

Namun, ada juga warga yang setuju dengan proyek tambang tersebut dengan alasan untuk kemaslahatan orang banyak karena para petani ingin hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga akan membuat pariwisata dari bekas tambang tersebut. Itulah yang membuat sebagian masyarakat menerima adanya proyek tambang tersebut, menurut mereka dari segi harga dan janji pemerintah tidak merugikan masyarakat karena pemerintah akan ganti rugi kepada warga yang merelakan lahannya untuk proyek tambang *quarry*. Masyarakat pun ikut mensosialisasikan kepada yang lainnya karena bagi mereka tidak ada pro dan kontra dalam pembangunan tambang bendungan Bener tersebut (Amaliyah, 2022).

Dengan adanya penolakan dari masyarakat yang kontra akan pembangunan tersebut, pemerintah provinsi bukannya tinggal diam tetapi selalu mencari solusi alternatif. Pembangunan bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 109 tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden no. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah melalui Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah telah melakukan pendekatan komunikatif dan pendekatan sosial kepada warga Wadas yang menolak pembangunan bendungan Bener, dengan cara memfasilitasi dari segi kesehatan dan sarana telekomunikasi. Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat yang kontra akan pembangunan tersebut.

Ganjar Pranowo S.H., M. IP selaku gubernur Jawa Tengah mengunjungi masyarakat di desa Wadas dengan tujuan meminta maaf kepada masyarakat yang kontra, karena sebagian masyarakat merasa tidak nyaman sehingga beliau akan bertanggung jawab penuh atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Ganjar Pranowo “*saya minta maaf atas kejadian kemarin, yang bertanggung jawab biar Gubernurnya saja*”. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah memberi solusi dengan merencanakan beberapa hal yaitu melakukan beberapa teknis, melakukan metode pendekatan, dan yang selama ini menjadi polemik antara pihak pro dan pihak kontra sehingga membuka dialog yang memperbaiki konflik tersebut (Pranowo, 2022)

Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Kekuasaan pada Zaman Khalifah Abu Bakar seperti yang diajarkan Rasulullah, bersifat sentral: legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Selain itu, Khalifah Abu Bakar juga menegakkan hukum dan juga selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam hal apapun (Abbas, 2019).

Seperti halnya sistem pemerintahan di Indonesia bersifat demokrasi dengan selalu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan juga bersifat : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini sering disebut dengan istilah “*Trias politica*” konsep ini dikemukakan pada tahun 1748 oleh Montesquieu Filusuf asal Prancis, *Trias politica* ini sendiri berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yang berarti tiga dan “*As*” yang berarti pusat, dan “*Politica*” berarti kekuasaan. Sehingga definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang beranggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam, yakni : Legislatif (membuat undang-undang),

Eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan Yudikatif (mengadili atas pelanggaran undang-undang). (Yulistiyowati et al., 1945).

Sudah selayaknya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas berjalannya kebijakan disuatu negara berlaku adil kepada masyarakatnya, begitu pun sebaliknya masyarakat dituntut untuk taat kepada pemerintah sebagaimana yang Allah firman-kan yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat diatas, Allah SWT menjelaskan syarat-syarat iman dan batasan dalam islam. Di waktu yang sama dijelaskan pulalah kaidah-kaidah berupa peraturan pokok bagi ummat islam tentang kaidah hukum dan kekuasaan. Semuanya diawali dan diakhiri dengan menerima ketetapan dari Allah semata dan akan kembali kepada Allah jika tidak sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Sesuai dengan dalil diatas Allah telah menciptakan syariat yang tertulis dalam Al-Qur'an dan mengutus seorang Rasulallah yang tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya untuk memberitahu berita kepada manusia. Oleh karenanya syariat Rasulallah SAW, termasuk juga kedalam syariat Allah. Rasulallah memiliki tugas mengemban risalah yang diperintahkan langsung oleh Allah, dengan menaati Rasul berarti menaati Allah yang telah mengutusny. Adapun mengenai *Ulil Amri* ayat diatas menjelaskan tentang siapa mereka (ulil amri) yang di maksudnya ialah dari kalangan orang-orang mukmin. Ulil Amri wajib taat kepada Allah dan RasulNya yang telah membuat kebijakan hukum dan hak membuat syariat. Dalam ayat diatas juga menjelaskan bahwa taat kepada Allah dan RasulNya adalah pokok, sedangkan taat kepada Ulil Amri hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulallah saj (Quthb, 2001)

Komunikasi merupakan jembatan penghubung antara kebijakan yang dibuat pemerintah dan aspirasi yang disampaikan rakyat sehingga suatu negara berjalan sesuai dengan tatanan sistem pemerintahannya.

Komunikasi merupakan jembatan penghubung antara kebijakan yang dibuat pemerintah dan aspirasi yang disampaikan rakyat sehingga suatu negara berjalan sesuai dengan tatanan sistem pemerintahannya.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Dengan komunikasi yang baik, sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an sehingga tidak ada kedzholiman yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.

SIMPULAN

Komunikasi merupakan interaksi antara komunikator dan komunikan yang mengandung pesan dan adanya timbal balik (*feedback*). Komunikasi juga dibutuhkan bagi pemerintah dan masyarakat agar terlaksananya hubungan administratif yang baik. Sehingga terhindar dari konflik yang menimbulkan suasana tidak kondusif. Sejak tahun 2019 hingga saat ini terjadi konflik di desa Wadas, penyebabnya adalah karena adanya proyek tambang andesit yang menargetkan 15,53 juta meter kubik untuk pembangunan bendungan Bener.

Pemerintah Pusat era Presiden Jokowi Widodo melakukan pembangunan multinasional berupa Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi di beberapa daerah Indonesia, yang tertuang dalam proyek Strategis Nasional, selain itu juga, adanya SK Gubernur No. 590/14/2018 yang menetapkan Desa wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sebagai lokasi pembebasan lahan untuk dijadikan lokasi pengambilan bahan material yakni batuan andesit untuk tujuan pembangunan bendungan Bener.

Setelah adanya ketetapan SK Gubernur, masyarakat di desa Wadas ada yang menerima dan ada juga yang menolak karena beberapa alasan. Masyarakat yang menerima pembangunan bendungan Bener pun ikut mensosialisasikan kepada yang lainnya karena bagi mereka tidak ada pro dan kontra dalam pembangunan tambang bendungan Bener tersebut. Dengan adanya penolakan dari masyarakat yang kontra akan pembangunan tersebut, pemerintah provinsi bukannya tinggal diam tetapi selalu mencari solusi alternatif.

Kekuasaan pada Zaman Khalifah Abu Bakar seperti yang diajarkan Rasulullah sama seperti sistem pemerintahan di Indonesia yang bersifat sentral: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Selain itu, Khalifah Abu Bakar juga menegakkan hukum dan juga selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam hal apapun sama seperti di Indonesia yang menegakkan sistem demokrasi (musyawarah untuk mufakat).

Sudah selayaknya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas berjalannya kebijakan disuatu negara berlaku adil kepada masyarakatnya, begitu pun sebaliknya masyarakat dituntut untuk taat kepada pemerintah sebagaimana yang Allah firman-kan yang berbunyi : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (Q.S. An-Nisaa’ : 59)

Komunikasi merupakan jembatan penghubung antara kebijakan yang dibuat pemerintah dan aspirasi yang disampaikan rakyat sehingga suatu negara berjalan sesuai dengan tatanan sistem pemerintahannya. Dengan komunikasi yang baik, sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur’an sehingga tidak ada kedzholiman yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan ummat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, N. (2019). Strategi Komunikasi Pemerintahan Di Masa Umar Ibn Al-Khattab. *Jurnal Jurnalisa*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i1.5617>
- Absori, A., Wardiono, K., Yuspin, W., Bangsawan, M. I., Budiono, A., & Fairuzzaman, F. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 4(1), 26–32. <https://doi.org/10.35970/madani.v4i1.955>
- Amaliyah, S. (2022). *Begini Alasan Warga yang Pro dan Kontra Penambangan di Wadas*. Nu.or.Id. <https://www.nu.or.id/nasional/begini-alasan-warga-yang-pro-dan-kontra-penambangan-di-wadas-qsYpc>
- Katsir, I. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (M. Yusuf Harun, F. Okbah, Y. Abdul Qadir Jawas, T. Saleh Alkatsiri, F. Dloifur, M. B.M. Ba'muallim, H. Nur Wahid, & A. Malik (eds.); M. Abdul Ghofar (trans.); 1st ed.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kompas. (2022). *Awal Mula Warga Wadas Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/17020441/awal-mula-warga-wadas-melawan-tolak-tambang-batu-andesit-untuk-proyek?page=all>
- KPPIP. (2016). *PROYEK BENDUNGAN DAN JARINGAN IRIGASI*. Kppip.Go.Id. <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/>
- Muhammad, A. (2015). *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara.
- Pranowo, G. (2022). *Temui Warga Kontra Tambang Wadas*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=zM0D6gPk1JY>
- Quthb, S. (2001). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an; Dibawah Naungan Al-Qur'an* (1st ed.).Gema Insani Press.
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi pemerintahan: mengirim dan menerima informasi tugas dan informasi publik. *Administrasi Publik*,3(1). <https://media.neliti.com/media/publications/73167-ID-komunikasi-pemerintahan-mengirim-dan-men.pdf>
- West, R., & H. Turner, L. (2013). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan aplikasi* (N. Setyaningsih (ed.); M. Natalia Damayanti Maer (trans.); 13th ed.). Salemba Humanika.
- Wiratna Sujarweni, V. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Paper Plane (ed.); 1st ed.). Pustaka Baru Press.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (1945). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/580/390>